

## **Upaya Pencegahan Praktik Politik Dinasti Melalui Kaderisasi Partai Politik**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**Raihan Putradinata, Lailatus Sururiyah**

Email: [raihanputradinata@umsu.ac.id](mailto:raihanputradinata@umsu.ac.id)

### **Abstrak**

Fenomena politik dinasti di Indonesia menjadi ancaman serius bagi prinsip demokrasi, karena memungkinkan seseorang menduduki jabatan publik tanpa pengalaman atau kompetensi yang memadai, melainkan karena hubungan kekerabatan dan kekuatan elit politik tertentu. Praktik ini membatasi kesempatan bagi calon pemimpin lain yang potensial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji faktor pendorong, dampak terhadap demokrasi, serta peran partai politik dalam mencegah politik dinasti. Hasilnya menunjukkan bahwa partai politik memiliki peran penting dalam pencegahan melalui mekanisme kaderisasi yang objektif, pelatihan dan pembinaan kader tanpa pengaruh nepotisme, serta seleksi berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan loyalitas terhadap partai. Partai politik juga harus menjamin bahwa kader yang dicalonkan dalam pemilu memiliki kredibilitas dan integritas, bukan karena kekuatan politik dinasti di belakangnya.

**Kata Kunci: Politik Dinasti, Kaderisasi, dan Partai Politik.**

### **Abstract**

*The phenomenon of political dynasties in Indonesia poses a serious threat to the principles of democracy, as it allows individuals to assume public office without sufficient experience or competence, but rather due to familial ties and the influence of powerful political elites. This practice limits opportunities for other potential leaders. This research employs a normative juridical approach to examine the driving factors behind political dynasties, their impact on democracy, and the role of political parties in preventing such practices. The findings indicate that political parties play a crucial role in prevention by implementing objective cadre recruitment mechanisms, providing training and development without nepotistic influence, and selecting candidates based on competence, experience, and loyalty to the party. Political parties must also ensure that candidates nominated for public office through elections possess credibility and integrity, not merely the backing of a political dynasty.*

**Keywords: Political Dynasty, Cadre Development, and Political Parties .**

### **A. Pendahuluan**

Setiap masyarakat memiliki sistem aturan yang dibuat oleh pihak yang berkuasa untuk mengatur perilaku anggotanya. Dalam masyarakat demokratis, warga negara memiliki suara dalam membuat dan menerapkan aturan tersebut, sedangkan dalam sistem oligarki atau kediktatoran, pengambilan keputusan terkonsentrasi pada beberapa pemimpin saja. Perlindungan hukum merupakan layanan penting pemerintah untuk menjamin keselamatan warga dan menegakkan hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Indonesia. Prinsip ini menjadi dasar bagi undang-undang seperti Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Partai Politik yang menegaskan komitmen kuat terhadap demokrasi demi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.<sup>1</sup>

Politik memiliki fungsi penting dalam mengelola kekuasaan di masyarakat dan pemerintahan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Politik sangat terkait dengan kehidupan sosial manusia, karena individu dan kelompok hidup dalam komunitas yang diatur oleh nilai dan aturan bersama. Politik melibatkan proses perolehan, penggunaan, dan pemeliharaan kekuasaan, yang sering kali berlangsung melalui persaingan. Dalam sistem demokrasi modern, persaingan ini diatur melalui pemilihan umum di mana rakyat memilih pemimpinnya. Siapa pun dapat mencalonkan diri, namun dalam praktiknya, pejabat yang sedang menjabat sering kali berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan mengangkat

---

<sup>1</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 9.

anggota keluarga atau kerabat, yang dikenal sebagai politik dinasti, yang melemahkan prinsip demokrasi.<sup>2</sup>

Politik dinasti adalah konsentrasi kekuasaan dalam keluarga elit yang menempatkan kerabatnya dalam jabatan pemerintahan melalui jaringan yang terstruktur, terutama saat pemilihan. Meskipun tidak diakui secara formal dalam sistem politik Indonesia, praktik ini cukup luas dan dianggap bermasalah karena lebih mengutamakan kepentingan keluarga dibandingkan kesejahteraan rakyat serta mendorong korupsi. Partai politik cenderung mencalonkan kandidat berdasarkan keinginan elitnya, bukan melalui mekanisme demokratis yang mengutamakan kompetensi dan integritas. Kondisi ini mendorong penelitian lebih lanjut tentang bagaimana partai politik dapat mencegah politik dinasti dengan menerapkan proses kaderisasi yang adil dan objektif. Fenomena politik dinasti juga berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi, karena mengurangi kesempatan bagi individu yang memiliki kapasitas dan integritas untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Sistem yang seharusnya terbuka untuk semua warga negara justru dipersempit oleh kepentingan keluarga tertentu. Hal ini bertentangan dengan prinsip meritokrasi, di mana seseorang seharusnya dipilih berdasarkan kemampuan, prestasi, dan dedikasinya kepada masyarakat, bukan karena hubungan darah atau kedekatan dengan penguasa.

Selain menurunkan kualitas demokrasi, politik dinasti juga berpotensi memperburuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan adanya jaringan keluarga dalam kekuasaan, pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang sering kali menjadi lemah. Para pejabat yang memiliki hubungan kekerabatan cenderung saling melindungi dan mengutamakan loyalitas keluarga di atas kepentingan publik. Hal ini menciptakan lingkaran kekuasaan yang sulit ditembus oleh pihak luar, sehingga kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak berpihak pada rakyat.

Untuk mencegah meluasnya praktik politik dinasti, perlu adanya reformasi dalam mekanisme partai politik, termasuk penerapan sistem rekrutmen yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan politik kepada masyarakat juga sangat penting agar rakyat lebih kritis dalam memilih calon pemimpin. Dengan meningkatkan kesadaran politik rakyat, praktik politik dinasti dapat ditekan, karena pemilih akan lebih cenderung memilih kandidat yang berintegritas, kompeten, dan memiliki visi membangun bangsa, bukan sekadar karena faktor keturunan atau pengaruh keluarga elit.<sup>3</sup>

Selain melalui mekanisme partai politik, peran lembaga penyelenggara pemilu juga sangat penting dalam membatasi ruang gerak politik dinasti. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pencalonan dan pemilihan berjalan secara adil, transparan, serta bebas dari intervensi kepentingan keluarga penguasa. Regulasi yang jelas mengenai syarat pencalonan, keterbukaan laporan kekayaan, serta pembatasan praktik politik uang dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meminimalkan praktik dinasti politik. Dengan pengawasan yang ketat dan independen, proses demokrasi dapat kembali ke jalurnya, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Di sisi lain, peran masyarakat sipil tidak boleh diabaikan dalam mencegah menguatnya politik dinasti. Organisasi non-pemerintah, media, akademisi, dan kelompok masyarakat perlu bersinergi dalam memberikan pendidikan politik serta mengawasi jalannya pemerintahan. Media, misalnya, dapat berfungsi sebagai pilar keempat demokrasi dengan menyuarakan kritik, mengungkap praktik KKN, dan menyampaikan informasi yang objektif kepada publik terkait calon pemimpin.<sup>4</sup> Dengan demikian, rakyat dapat memiliki akses terhadap informasi yang akurat sebelum memberikan suara mereka. Apabila kesadaran kritis masyarakat semakin meningkat, maka politik dinasti akan kehilangan basis dukungannya, karena rakyat tidak lagi memilih berdasarkan kedekatan keluarga, melainkan berdasarkan rekam jejak, visi, dan program nyata calon pemimpin.

Pada akhirnya, upaya menekan politik dinasti harus dipandang sebagai bagian dari perjuangan panjang memperkuat demokrasi substantif di Indonesia. Demokrasi tidak hanya diukur dari

---

<sup>2</sup> Abdulkadir B. Nambo dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa. (2005). "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)" *Jurnal Mimbar*. Volume XXI No. 2, halaman 262

<sup>3</sup> Syamsuddin Haris, *Demokrasi di Indonesia: Tantangan Politik Dinasti dan Kualitas Kepemimpinan*, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 10, No. 2 (2019), 155–172

<sup>4</sup> Ratna Herawati, *Partai Politik, Dinasti Kekuasaan, dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 4 (2020), hlm. 722–740

terselenggaranya pemilu secara rutin, tetapi juga dari kualitas kompetisi politik yang adil, inklusif, dan berbasis meritokrasi. Tanpa perlawanan serius terhadap politik dinasti, Indonesia berisiko terjebak dalam demokrasi prosedural yang hanya menampilkan wajah demokrasi, tetapi sebenarnya dikuasai oleh segelintir elite keluarga. Oleh sebab itu, perlu sinergi antara regulasi yang tegas, pengawasan yang independen, partai politik yang berkomitmen terhadap kaderisasi, serta masyarakat yang semakin kritis agar demokrasi Indonesia mampu berkembang secara sehat, menghasilkan pemimpin yang benar-benar lahir dari rakyat, dan bekerja untuk kepentingan rakyat.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.<sup>5</sup> Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>6</sup> Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.<sup>7</sup> Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.<sup>8</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.<sup>9</sup>

## B. Pembahasan

Praktik politik dinasti dalam partai politik di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor kultural yang berakar dari sejarah nusantara yang dahulu dipimpin oleh kerajaan dan kesultanan. Selain itu, faktor ambisi keluarga atau kelompok tertentu yang ingin mempertahankan kekuasaan secara turun-temurun juga menjadi penyebab utama munculnya politik dinasti. Kelompok ini merasa berhak memimpin partai atau daerah tertentu dan menggunakan berbagai cara, termasuk kecurangan dalam pemilu seperti money politik dan intervensi penyelenggara, demi mempertahankan kekuasaannya.<sup>10</sup>

Faktor tamak dan serakah juga memperkuat politik dinasti, di mana keluarga atau kelompok yang telah menguasai kekuasaan selama lama berusaha mempertahankan dan menambah kekayaan serta fasilitas yang telah mereka nikmati. Dalam praktiknya, meskipun partai politik memiliki aturan dalam AD/ART tentang kaderisasi dan mekanisme suksesi kepemimpinan, kepemimpinan partai seringkali stagnan dan cenderung diwariskan kepada keluarga atau kerabat ketua umum yang lama. Fenomena ini terlihat jelas pada beberapa partai besar di Indonesia seperti PDIP dan Partai Demokrat, di mana jabatan ketua umum dijabat oleh pendiri atau keluarganya dalam jangka waktu sangat panjang.<sup>11</sup>

Kondisi ini mencerminkan bahwa politik dinasti sulit dihindari di Indonesia, bukan hanya karena faktor finansial, tetapi juga karena adanya budaya pengkultusan terhadap pemimpin berdasarkan garis

<sup>5</sup> Hanifah, I., & Koto, I. (2025). Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements Before and After the Job Creation Law. *Kosmik Hukum*, 25(2), 245-256.

<sup>6</sup> Simatupang, R. S. A., Hanifah, I., & Mansar, A. (2025). The Concept of Restitution as Legal Accountability in the Crime of Human Trafficking. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(2), 3554-3462.

<sup>7</sup> Faisal, F. (2023, March). The Role On Nazhir In Developing Waqf. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1621-1626).

<sup>8</sup> Zainuddin, Z., & Dewi, S. C. (2025, June). Hukum Administrasi Negara Dalam Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 4, No. 1, pp. 390-395).]

<sup>9</sup> Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54–63.

<sup>10</sup> Syamsuddin Haris, et.al. 2005. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Legislatif Pemilu 2004*, Jakarta: Gramedia, halaman xvii.

<sup>11</sup> Syamsuddin Haris, et.al. *Op. Cit*, halaman 5

keturunan. Politik dinasti tidak hanya terjadi di tubuh partai politik, tetapi juga meluas ke jabatan publik dan eksekutif negara, di mana kekuasaan sering kali diwariskan demi mempertahankan status quo. Untuk mengatasi hal ini, partai politik perlu mengembalikan sistem kaderisasi sesuai dengan ideologi dan aturan internal yang demokratis agar memberikan kesempatan yang adil bagi kader lain untuk berkembang dan memimpin, sehingga partai tidak lagi didominasi oleh keluarga tertentu.

Praktik politik dinasti dalam partai politik di Indonesia berdampak negatif terhadap demokrasi dan kualitas kepemimpinan. Politik dinasti menyebabkan kebijakan partai menjadi sentralistik dan otoriter, di mana kekuasaan terpusat pada elite keluarga tertentu yang mengabaikan aspirasi kader lain. Hal ini menghilangkan proses demokrasi internal partai yang seharusnya menjunjung nilai keadilan, keterbukaan, dan partisipasi aktif anggota. Mekanisme pemilihan ketua umum yang semestinya berdasarkan kompetensi sering kali diabaikan karena calon yang terpilih adalah mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa lama. Akibatnya, partai menjadi tertutup, kehilangan idealisme dan integritas, serta lebih mementingkan kepentingan kelompok elite dibanding kepentingan rakyat, sehingga lama-kelamaan partai kehilangan kepercayaan dan dukungan publik.

Dampak politik dinasti juga terlihat pada kualitas kepemimpinan di tingkat pemerintahan, di mana calon pemimpin dipilih bukan berdasarkan kemampuan dan prestasi, melainkan karena kedekatan keluarga atau kelompok elite tertentu. Hal ini menghambat proses demokrasi yang sehat dan membuat Indonesia belum stabil dalam perkembangan demokrasi. Politik dinasti memicu perpecahan internal partai dan melemahkan regenerasi kepemimpinan, sehingga partai dan pemerintahan rentan runtuh akibat kehilangan dukungan rakyat. Dengan praktik ini, calon yang sebenarnya berpotensi sering kali tersingkir, sementara penguasa dari dinasti tertentu terus mendominasi, menghambat kemajuan demokrasi dan kesejahteraan bangsa.<sup>12</sup>

Selain melemahkan demokrasi, politik dinasti juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sebagai pilar utama demokrasi. Rakyat yang melihat partai hanya dikuasai oleh segelintir keluarga elit akan merasa skeptis terhadap mekanisme politik yang ada, sehingga tingkat partisipasi politik masyarakat bisa menurun. Penurunan partisipasi ini berbahaya karena dapat membuka ruang bagi praktik otoritarianisme baru, di mana rakyat tidak lagi percaya bahwa suara mereka memiliki pengaruh dalam menentukan arah kebijakan negara.

Lebih jauh, politik dinasti juga berpotensi menurunkan kualitas kebijakan publik yang dihasilkan. Pemimpin yang lahir dari praktik dinasti sering kali tidak dipilih karena kapasitasnya, melainkan karena hubungan kekerabatan. Akibatnya, kebijakan yang diambil bisa tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat, melainkan lebih diarahkan untuk melindungi kepentingan kelompok elit. Hal ini memperburuk ketimpangan sosial, memperlebar jurang antara rakyat dan penguasa, serta memperlambat proses pembangunan nasional.

Untuk mencegah dampak negatif tersebut, perlu adanya penguatan regulasi terkait demokratisasi internal partai politik. Negara harus menegakkan aturan yang mendorong partai politik melakukan rekrutmen dan kaderisasi yang terbuka, adil, dan kompetitif.<sup>13</sup> Selain itu, masyarakat sipil juga harus lebih kritis dalam mengawasi proses politik, termasuk dalam pemilihan pemimpin partai maupun pejabat publik. Dengan kombinasi antara regulasi yang kuat dan partisipasi aktif rakyat, praktik politik dinasti dapat ditekan, sehingga demokrasi Indonesia dapat tumbuh lebih sehat dan menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, serta berpihak pada kepentingan rakyat.

Selain reformasi regulasi dan pengawasan, penting pula membangun budaya politik yang sehat di tengah masyarakat. Politik dinasti bertahan bukan hanya karena lemahnya aturan, tetapi juga karena masih kuatnya budaya patronase yang menempatkan figur pemimpin sebagai pusat loyalitas. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih memilih calon dari keluarga tertentu karena dianggap memiliki "warisan kepemimpinan" dari orang tua atau kerabatnya yang sebelumnya berkuasa. Pola pikir seperti ini memperkuat politik dinasti dan menutup peluang bagi calon lain yang sebenarnya memiliki kemampuan lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan politik perlu digencarkan agar masyarakat tidak

---

<sup>12</sup> Firman Noor, Politik Dinasti dan Krisis Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 15, No. 1 (2018), 37–56

<sup>13</sup> Alfian Alfian, Partai Politik, Oligarki, dan Politik Dinasti di Indonesia, *Jurnal Politik*, Vol. 6, No. 2 (2020), 245–262.

hanya menilai calon pemimpin dari latar belakang keluarganya, tetapi lebih pada rekam jejak, kompetensi, integritas, serta program kerja yang ditawarkan. Dengan meningkatnya literasi politik, rakyat dapat menjadi penyeimbang yang efektif terhadap dominasi dinasti politik.

Lebih jauh, partai politik sebagai institusi demokrasi harus mampu menjadi laboratorium kaderisasi yang melahirkan pemimpin berkualitas, bukan sekadar melestarikan kepentingan keluarga elite. Reformasi internal partai tidak hanya sebatas aturan formal dalam AD/ART, tetapi harus diimplementasikan secara konsisten dengan memberikan ruang kompetisi yang adil bagi seluruh kader. Transparansi dalam pemilihan ketua umum, pembatasan masa jabatan, serta pelibatan anggota dalam pengambilan keputusan dapat memperkuat demokrasi internal. Jika partai mampu menjalankan kaderisasi secara sehat, maka lahir pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dan mampu menjalankan fungsi representasi rakyat secara optimal. Dengan demikian, partai politik dapat kembali memperoleh kepercayaan publik dan menjadi pilar penting bagi penguatan demokrasi Indonesia yang bebas dari jeratan politik dinasti.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Praktik politik dinasti dalam partai politik di Indonesia dipicu oleh faktor budaya, ambisi keluarga atau elite tertentu untuk mempertahankan kekuasaan, kepentingan pribadi yang didorong oleh sifat tamak, serta kelemahan manajemen organisasi partai yang rentan terhadap pengaruh eksternal. Dampaknya sangat negatif terhadap demokrasi dan kualitas kepemimpinan, karena pemimpin yang terpilih sering kali tidak memiliki kapasitas dan kelayakan yang memadai, sehingga merugikan masyarakat. Politik dinasti melemahkan proses demokrasi internal partai dan menghambat kemajuan politik yang sehat.

### **2. Saran**

Partai politik perlu memperkuat mekanisme kaderisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang demokratis dan transparan. Proses pembinaan kader harus fokus pada pengembangan kapasitas, integritas, dan kredibilitas calon pemimpin sehingga pemilihan pimpinan partai benar-benar mencerminkan kompetensi dan kepercayaan. Dengan demikian, partai dapat mencegah praktik politik dinasti dan melahirkan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi partai dan masyarakat luas.

**Daftar Pustaka**

- Abdulkadir B. Nambo dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa. (2005). “Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)” *Jurnal Mimbar*. Volume XXI No. 2.
- Hanifah, I., & Koto, I. (2025). Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements Before and After the Job Creation Law. *Kosmik Hukum*, 25(2), 245-256.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54–63.
- Simatupang, R. S. A., Hanifah, I., & Mansar, A. (2025). The Concept of Restitution as Legal Accountability in the Crime of Human Trafficking. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(2), 3554-3462.
- Syamsuddin Haris, et.al. 2005. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Legislatif Pemilu 2004*, Jakarta: Gramedia.
- Ratna Herawati, Partai Politik, Dinasti Kekuasaan, dan Masa Depan Demokrasi Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 4 (2020), hlm. 722–740
- Firman Noor, Politik Dinasti dan Krisis Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 15, No. 1 (2018), 37–56
- Alfan Alfian, Partai Politik, Oligarki, dan Politik Dinasti di Indonesia, *Jurnal Politik*, Vol. 6, No. 2 (2020), 245–262.
- Faisal, F. (2023, March). The Role On Nazhir In Developing Waqf. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1621-1626).
- Zainuddin, Z., & Dewi, S. C. (2025, June). Hukum Administrasi Negara Dalam Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 4, No. 1, pp. 390-395).]